

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan global sekarang ini menjadi tantangan tak bisa dihindari oleh perusahaan di Indonesia. Banyaknya sektor industri di Indonesia dalam mengelola industri memiliki operasional yang berbeda tapi harus membuat laporan keuangan untuk digunakan pihak internal seperti komisaris, direktur, manajer, dan karyawan dan pihak eksternal seperti investor, kreditor. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dari perusahaan dan akuntansi identik dengan informasi. Dengan akuntansi keuangan akuntan berusaha untuk menyederhanakan kegiatan operasional perusahaan yang bersifat finansial kedalam lembaran-lembaran yang berisi tulisan dan angka dikumpulkan dan dibagikan kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan dokumen tersebut. Akuntan menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas (Biduri et al., 2019).

Ada dua tujuan dari pelaporan keuangan pertama memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, tujuan kedua memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh tingkat laba, tingkat pengembalian investasi, serta prospek arus kas bersih perusahaan (Dewi, 2020). Dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan diberikan kebebasan dalam memilih metode akuntansi

berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi keuangan (SAK) (Tazkiya & Sulastiningsih, 2020)

International Financial Reporting Standar (IFRS) istilah konservatisme akuntansi yang dikenal dengan prudence. Prudence lebih berfokus pada kehati-hatian dalam melakukan penilaian pada keadaan yang tidak pasti pada suatu perusahaan terhadap aset, utang dalam membuat laporan keuangan (Sinambela & Almilia, 2018). Perusahaan memilih metode akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan untuk mengantisipasi perekonomian yang tidak stabil (Iskandar & Sparta, 2019). Penerapan konservatisme akuntansi semenjak diberlakukan IFRS tetap dilaksanakan, meskipun IFRS menyiratkan bahwa prinsip ini tidak lagi digunakan. Perusahaan tetap melakukan menggunakan konservatisme dalam beberapa keadaan tertentu seperti kompensasi kerugian menyebabkan pengakuan piutang pajak tangguhan, kapitalisasi biaya pengembangan, dan pengakuan cadangan piutang tidak tertagih (Apriani, 2015). Prinsip antara prudence dengan konservatisme memiliki perbedaan pada pengakuan pendapatan. Dalam konsep prudence pendapatan boleh diakui bila standar dalam pengakuan pendapatan dapat terpenuhi, konservatisme mengakui beban terlebih dahulu baru mengakui pendapatan (Mumayiz & Cahyaningsih, 2020).

Selain itu, karakteristik IFRS yang menggunakan *principle based* membutuhkan *professional judgment* dalam penilaian suatu akun untuk meningkatkan optimisme suatu perusahaan dan perusahaan bisa dapat mengakui perubahan nilai suatu akun berdasarkan *fair value* dan optimis perubahan nilai

tersebut akan terealisasi (Mumayiz & Cahyaningsih, 2020). Berdasarkan prinsip konservatisme jika ada ketidakpastian tentang kerugian, maka cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, maka tidak harus mencatat keuntungan. Maka, laporan keuntungan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset lebih rendah demi untuk berjaga jaga (Vilella, 2013). Prinsip konservatisme adalah prinsip yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam melakukan proses pelaporan keuangan (Putra , 2019).

Perusahaan memilih metode akuntansi yang dianggap sesuai dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Konservatisme didefinisikan sebagai sebuah reaksi kehati hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian dimana reaksi ini ditunjukkan untuk melindungi hak-hak serta kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*) (Alviani et al., 2020). Perhitungan keuangan yang tidak akurat menunjukkan kurangnya penerapan prinsip kehati hatian dalam mengakui pendapatan dan pengeluaran dalam proses penyusunan laporan keuangan (Sugiono dan Fachrurrozie, 2018). Hal ini dapat menimbulkan potensi terjadinya manipulasi pelaporan keuangan.

Konservatisme akuntansi salah satu prinsip kualitatif dalam menyusun laporan keuangan, prinsip ini memberikan dampak yang baik untuk mencegah perilaku oportunistik (El-Habashy, 2019). Menurut Ramadona, (2016) prinsip konservatisme menyatakan bahwa dalam memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, diutamakan pilihan yang mempunyai dampak keuntungan lebih kecil terhadap modal pemegang saham. Jika perusahaan

memiliki keuntungan yang cukup tinggi akan mengakibatkan meningkatnya pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut (Novitasari et al., 2019). Konservatisme akuntansi digunakan untuk membatasi perilaku untuk melebih-lebihkan keuntungan, menghindari perilaku oportunistik manajer, dan dapat menghindari suatu ketidakpastian (Mumayiz & Cahyaningsih, 2020). Penerapan konservatisme yang kurang memadai pada penyajian laporan keuangan dapat menimbulkan skandal akuntansi. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi terkait kurangnya memperhatikan prinsip konservatisme akuntansi yaitu PT. Garuda Indonesia semua bermula dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Grup membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp.11,33 miliar angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita kerugian USD216,5 juta. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik antara dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pasalnya Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT. Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT. Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayar. Pada tanggal 30 April BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanti Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO Internasional). Disaat yang sama,

menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik.

Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan yang berkode saham GIAA itu, namun kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. 2 Mei 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 28 Juni 2019 Garuda Indonesia akhirnya kena sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yaitu KAP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Untuk auditor dibekukan selama 12 bulan, kepada jajaran direksi dan komisaris mereka patungan membayar Rp.100 juta (economy.okezone.com).

Fenomena lainnya terjadi pada sektor pertambangan yaitu PT. Timah (Persero). Dalam kasus ini Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi didepan Kementrian BUMN dalam orasinya, didepan Kementrian BUMN karyawan yang berjumlah 30 orang ini menyapaikan tuntutan agar jajaran direksi PT. Timah

(Persero) segera menggundurkan diri. Tuntutan ini bukannya tanpa alasan. Menurut ketua umum IKT Ali Samsuri. Direksi PT. Timah telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian saat menjabat selama 3 tahun semenjak 2013 lalu. IKT menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya pada *press release* laporan keuangan semester 1-2015 mengatakan bahwa efisien strategis dan membuahkan kinerja positif padahal kenyataannya pada semester 1-2015 laba operasi rugi sebesar Rp.59 M. selain mengalami penurunan laba PT. Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% dibandingkan 2013, pada tahun 2013, utang hanya mencapai Rp.263 M namun, jumlah utang meningkat hingga rp.2,3 T pada tahun 2015. PT. Timah (Perseroan) Tbk memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1-2015. kegiatan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT. Timah (Persero) Tbk yang mengkhawatirkan (www.tambang.persero.co.id).

Fenomena yang terjadi pada PT. Timah (Persero) Tbk sepanjang semester 1-2016 mencatat rugi sebesar Rp.155,38 miliar, dan berdasarkan laporan tertulis yang dipublikasikan perseroan emiten mencatat penurunan pendapatan pada usaha sebesar 12,34% dari 3,22 triliun disemester 1-2015 menjadi Rp.2,82 triliun di semester 2016. penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan volume ekspor penjualan dari 236,76 juta dolar di semester 1-2015 menjadi 179,75 dolar di semester 2016 (www.ekonomikompas.com).

Fenomena lainnya yaitu pada tahun 2013 Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa terdapat permasalahan pada PT. Dayaindo Resources Tbk yang terdaftar

dalam gugatan pailit. Hal ini dipertegas oleh BEI yang menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji laporan keuangan PT. Dayaindo Sources Tbk. Permasalahan perusahaan bermula dari laporan SUEK AG perusahaan asal Swiss tersebut mengaku mengalami kerugian sebesar US\$1 juta karena pembayaran sewa kapal pengangkut batu bara. BEI memutuskan untuk menghentikan sementara alur perdagangan saham perusahaan.

Selain itu anak perusahaan PT. Dayaindo Resources Tbk yaitu PT. Daya Mandiri Resources juga dikabarkan memiliki kewajiban di PT. Bank Internasional Indonesia Tbk yang belum terbayar sejuk bilan Oktober 2012. selain itu, PT. Daya Mandiri Resources juga diharuskan membayar bunga kepada Bulk Trading sebesar 5,33 persen per tahun, setidaknya mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp.90 M. kondisi perusahaan yang semakin buruk menyebabkan direktur PT. Dayaindo Resources meninggal dunia.

Berdasarkan contoh kasus diatas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih memiliki prinsip konservatif yang sangat rendah dalam mengatur keuangan perusahaan hingga mampu memicu berbagai masalah finansial. Berikut ini adalah data rata-rata nilai perusahaan berdasarkan perhitungan konservatisme akuntansi di ambil dari 5 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tahun	PT. Indocement Tunggal	PT. Semen Gresik	PT. Keramik Indonesia	BTON	PT. Gudang Garam
2018	0,09	0,12	0,05	0,16	0,1
2017	0,08	0,12	0,08	0,17	0,1
2016	0,06	0,11	0,11	0,17	0,22
2015	0,94	0,11	0,11	0,12	0,24

Beberapa hal yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu Konflik bondholders-shareholders. Konflik bondholders-shareholders terjadi karena adanya perbedaan tentang pembayaran dividen. Shareholders menuntut perusahaan membagi dividen yang tinggi sebagai hasil dari investasinya. Sebaliknya, bondholders menuntut perusahaan untuk tidak membayar dividen berlebih agar tersedia aset jaminan atau aset cukup untuk membayar hutang (Novita, 2016). Shareholders bersama dengan manajemen melakukan tindakan untuk melakukan transmisi kesejahteraan melalui pembayaran dividen. Kondisi ini membuat bondholders kehilangan jaminan pelunasan hutang yang berpotensi meningkatkan risiko tidak terbayar sehingga akan memperbesar konflik bondholders-shareholders.

Terkadang kepentingan tersebut sering bentrok karena manajemen dengan investor diduga termotivasi memiliki kepentingan masing-masing. Dilihat dari sisi manajemen sebagai agent manajemen dikhawatirkan akan melakukan manajemen

laba karena manajemen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*Principal*). Konflik ini muncul ketika perusahaan dihadapkan dengan kesempatan investasi pada proyek dengan *net present value* (NPV) yang penggunaan dana yang besar. Untuk memenuhi dana proyek yang ada, maka perusahaan cenderung mengambil hutang. Hal ini memicu konflik bondholders-shareholders. Konflik ini bukan berarti tidak bisa dicegah. Ada mekanisme yang bisa ditawarkan yaitu dengan mengurangi jumlah hutang, mengambil hutang jatuh tempo yang singkat.

Struktur penerimaan bondholders memperoleh pendapatan yang tetap dari bunga dan pengembalian atas pinjamannya, sedangkan shareholders memperoleh pendapatan atas kelebihan kewajiban yang perlu dibayarkan kepada bondholder. Dilihat dari tingkat resiko yang dihadapi, ketika shareholders melalui manajemen menjalankan aktivitas dengan resiko yang tinggi, maka tingkat resiko yang dihadapi bondholders jauh lebih tinggi daripada shareholders (Penerapan et al., 2018).

Hal lain yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu debt covenant atau perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Debt covenant kontrak hutang oleh kreditur untuk mendapatkan pinjaman dana dan perjanjian-perjanjian yang disepakati dalam pengembalian pinjaman (Iskandar & Sparta, 2019). Ketika menyusun kontrak perjanjian hutang, kreditur akan mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan melalui data laporan keuangan, terutama informasi yang berhubungan dengan risiko gagal bayar,

diantaranya volatilitas aset dan laba yang akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Debt covenant perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer untuk kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan dan membatasi segala aktivitas perusahaan yang merusak nilai perjanjian dan memicu pelanggaran oleh perusahaan karena tidak bisa bergerak bebas (Amanah & Suyono, 2020). Kontrak hutang tersebut membuat manajer mencari cara bagaimana menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang telah jatuh tempo, dan berupaya menghindari dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan

Debt covenant atau perjanjian hutang memiliki keterkaitan dengan membuat keputusan dalam menaikkan laba atau pendapatan serta melaporkan aset yang dimiliki oleh perusahaan secara berlebihan guna untuk mengurangi biaya kontrak utang (Mufidah dan Triyanto, 2018). Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Debt covenant lebih mengarah dan berpedoman pada angka akuntansi. Dalam hal ini manajer tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang telah dilaporkan konservatif. Ketika suatu perusahaan menentukan perjanjian utangnya dan mengakui kerugian secara lebih cepat dalam laporan keuangan, hal

tersebut akan memungkinkan mengurangi kesulitan dalam debt covenant (Collins, Chen, dan Melessa, 2017).

Political cost atau biaya yang ditanggung perusahaan yang ditimbulkan oleh informasi perdagangan dan biaya negoisasi yang dikenakan oleh pembuat keputusan. Political cost mempengaruhi sektor perusahaan sebab sektor perusahaan sangat rawan terhadap transfer kekayaan. Banyak perusahaan yang secara khusus menerapkan metode akuntansi untuk mengurangi pendapatan yang dilaporkan agar dapat mengurangi biaya politik yang ditanggung. Mereka mengungkapkan informasi sebagai bentuk jalan untuk meningkatkan hubungan dengan pemerintah, sehingga mencegah terjadinya transfer kekayaan melalui penurunan biaya politis mereka memperoleh keuntungan yang mendukung korporasi (Attia, 2016).

Biaya politis diproksikan dengan *market share*. Perusahaan dengan market share yang tinggi memiliki jaringan usaha yang lebih luas dan lebih terkenal. Sehingga mendapat tekanan yang lebih besar dari masyarakat dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial (Ulan Noviani & Alit Suardana, 2019). Market share menunjukkan persebaran pangsa pasar perusahaan dan mereka memperoleh laba yang tinggi. Hal tersebut sebanding dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan untuk menghindari protes sosial yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat.

Political cost disebabkan terdapatnya masalah antara pemangku kepentingan dan pemerintah yang mempunyai kuasa menjalankan pemindahan kekayaan

perusahaan atau emiten terhadap masyarakat menurut peraturan (Novitasari et al., 2019). Perusahaan yang berskala besar lebih cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena perusahaan besar memiliki laba atau keuntungan yang besar. Political cost memprediksikan manajer mengecilkan keuntungan agar dapat mengurangi biaya politik (Novitasari et al., 2019). Manajer akan berusaha untuk membuat laba seolah-olah kecil dengan metode akuntansi tertentu demi menutupi political cost yang tinggi (Milne, 2017).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya.
2. Penurunan laba yang drastis hingga perusahaan mengalami kerugian mengakibatkan perusahaan membuat laporan keuangan fiktif dan kondisi perusahaan yang mengawatirkan karena utang yang terus meningkat membuat perusahaan melakukan perubahan dalam laporan keuangan untuk menutupi kinerja keuangannya.
3. Menimbulkan laporan keuangan yang menyesatkan dan merugikan bagi para pengguna.
4. Masih banyak perusahaan yang melakukan perilaku oportunistik.
5. Perusahaan masih memiliki prinsip konservatif yang sangat rendah dalam mengatur keuangan perusahaan hingga mampu memicu berbagai masalah finansial.
6. Masih banyak pihak manajemen yang melakukan manajemen laba untuk meningkatkan keuntungan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penulis membatasi penelitian dengan tiga variabel independennya (X) adalah Konflik Bondholders-Shareholders (X1), Debt Covenant (X2), dan Political Cost (X3), Sedangkan untuk variabel dependennya (Y) adalah Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana pengaruh:

1. Konflik Bondholders-Shareholders terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Konflik Bondholders-Shareholder, Debt Covenant, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh Konflik Bondholders-Shareholder terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Pengaruh Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Pengaruh Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Konflik Bondholders-Shareholder, Bonus Plan, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan peneliti pada bidang Pelaporan Keuangan khususnya tentang pengaruh Konflik Bondholders-Shareholders, Bonus Plan, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi.

2. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memperbanyak pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan khususnya tentang Konflik Bondholders-Shareholders, Bonus Plan, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi.

3. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan mengenai pengaruh return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan untuk dapat memberikan informasi keuangan yang objectif relevan dan dapat diandalkan agar para investor dapat menilai suatu kondisi perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi.